



RENSTRA



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026



Dinsos_kaltim



Dinsos Kalimantan Timur



Hallo Dinsos Kaltim



dinsos.kaltimprov.go.id





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Sebagai Dokumen Perencanaan dan acuan Penganggaran untuk periode 3 (tiga) Tahun kedepan. Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dan arah Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang hendak dicapai dalam periode 2024-2026 dengan mempertimbangkan Capaian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial hingga saat ini, selain itu Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan Dasar dan Pedoman bagi semua Jajaran di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial secara Sinergis dan Berkesinambungan.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh Jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur kami berharap agar seluruh target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diimplementasikan dalam rangka ikut mensukseskan Program Pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Samarinda, Juli 2023



Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680814 199403 1 012

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen yang Dinamis, yaitu Dokumen yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan Kondisi dan Situasi Masyarakatnya. Masyarakat yang dinamis akan memunculkan Rencana-rencana Pembangunan dan Kebijakan serta Sasaran-sasaran yang berupaya Mempertajam Tujuannya yaitu Kesejahteraan Rakyat.

Demikian pula dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2024-20226 mengalami review yang diarahkan untuk keselarasan dan lebih mempertajam Sasaran dan Target Penanganan yang menjadi Tujuan Pelaksanaan yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Semoga dengan RENSTRA dapat dicapai hasil yang Optimal dan Kinerja yang lebih baik.

Samarinda, Juli 2023



Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19680814 199403 1 012

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROV. KALIMANTAN TIMUR	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumberdaya Dinas Sosial Prov. Kaltim	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kaltim.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Prov.Kaltim.....	26
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota.....	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kalimantan Timur	48
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	86
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	121

BAB. VIII. PENUTUP.....123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	20
2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ..	20
2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	21
2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama	21
2.5. Data Asset/Modal Lahan/Tanah Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur	22
2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	23
2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Masing-masing Bidang dan UPTD Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	31
3.2 Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah	38
3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	43
3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	44
3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya	45
3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	49
4.2 Program, Sasaran Program dan Target Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.	50
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	83
6.1 Rencana Program dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	92
7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2004-2026 melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Prov. Kaltim	121
7.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2004-2026 melalui indikator kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Prov. Kaltim	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Struktur Organisasi	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan Kemiskinan bukan hanya sekedar berapa Jumlah dan Persentase Penduduk berkaitan dengan Miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan Keparahan dari Kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah Penduduk Miskin, kebijakan Pengentasan Kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.

Adapun kondisi Umum terkait Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur pada Bulan Maret 2022 sebanyak 236,25 ribu (6,31 persen). Pada September 2021 sebanyak 233,13 ribu (6,27 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 3,12 ribu orang (secara persentase turun 0,04 persen poin);
2. Selama Maret 2022 – September 2021, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 1,74 persen, yaitu dari Rp. 703.223,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp. 728.208,- per kapita per bulan pada Maret 2022;
3. Periode bulan Maret 2022 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,037 pada keadaan bulan September 2021 menjadi 0,989 pada keadaan bulan Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,231 menjadi 0,226 pada periode yang sama;
4. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,327. Angka ini mengalami penurunan 0,004 jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,331;
5. Distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2022 sebesar 21,46 persen. Hal ini berarti distribusi pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,21 dan untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,46 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Semakin jauh dari angka nol, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) semakin melebar.

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di perdesaan juga mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase. Selama periode Maret 2022 – September 2021 penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0.06 persen. Tetapi Penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan yang kecil yaitu sebesar 0.01 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2022 dan September 2021 masing-masing sebesar 9,64 persen dan 9,63 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,80 persen pada bulan Maret 2022 dan 4,74 persen pada bulan September 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanganan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997, Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Penyelenggaraan Kualitas Anak;
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nmr);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 59).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dalam Aspek Ekonomi Wilayah Tujuan 2 (dua) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Sasaran 6 (enam) yaitu Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat;
2. Menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2024-2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Rencana Kerja Tahunan).
4. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik Tahunan maupun 3 (tiga) Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini menguraikan tentang Latar Belakang, Potensi dan Permasalahan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Dokumen lainnya.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROV. KALTIM

BAB ini menguraikan tentang kondisi Internal, Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan serta Tugas dan Fungsi Dinas.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB ini menguraikan dan mengidentifikasi tentang permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB ini menguraikan tentang program dan kegiatan Pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur .

BAB VII PENUTUP

BAB ini memuat kaidah pelaksanaan atas Keberadaan dan Fungsi Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani Permasalahan Sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

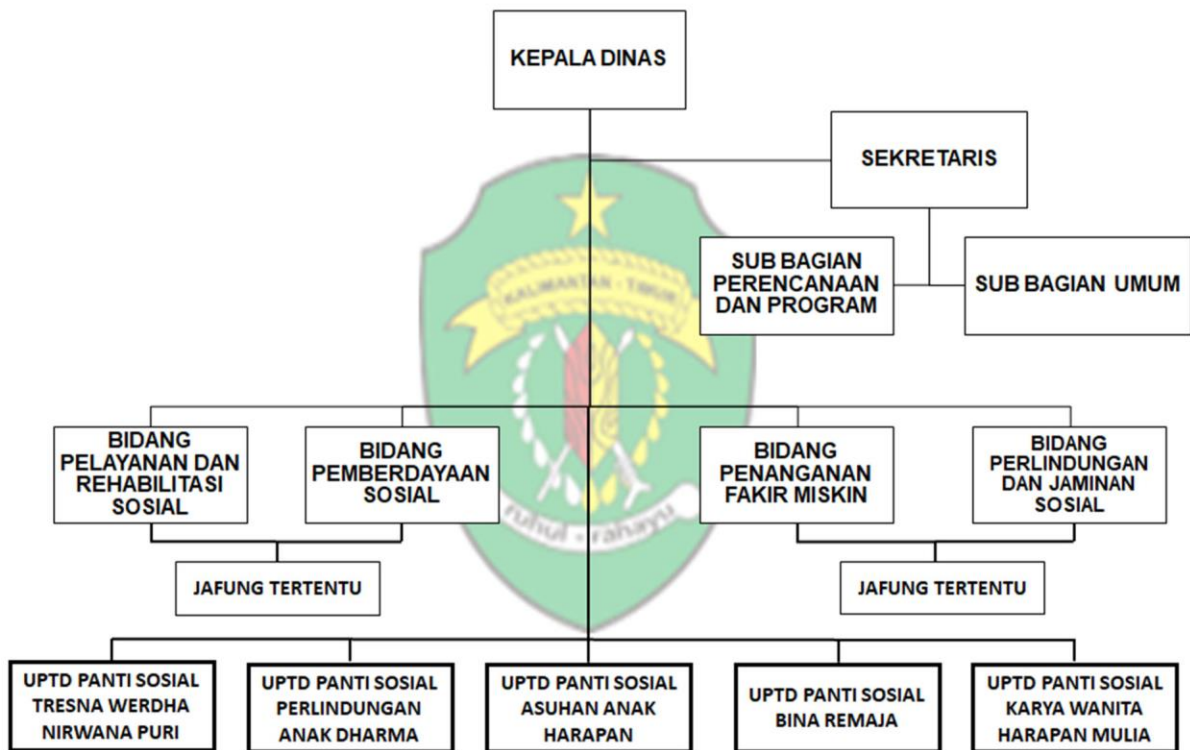
- a. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Timur;
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanganan, Pemberdayaan PMKS;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang Ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional Tertentu Seperti yang digambarkan pada bagan Struktur Organisasi di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Adapun yang menjadi uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;

- c. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penyiapan Bahan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Hukum dan Kehumasan Serta Pengaduan Masyarakat;
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi Keuangan;
- f. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Pemberdayaan Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;

- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- e. Penyiapan Bahan-Bahan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- g. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendataan komunitas adat terpencil serta melakukan pengkajian komunitas adat terpencil;
- b. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, mempunyai tugas melakukan perencanaan program pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Menyelenggarakan program atau kegiatan pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, menyusun laporan pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan mempersiapkan bahan koordinasi program pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;

- c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakwanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Kesejahteraan Anak;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- f. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- a. Seksi Kesejahteraan Anak dan lansia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kesejahteraan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban kerusuhan dan pengungsi serta melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi lanjut usia;
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi tuna sosial dan korban napza;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Penyusunan Pedoman Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;

- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pencegahan Dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikososial;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikososial, serta form keserasian sosial dengan kearifan lokal;
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas menyusun perencanaan serta menyelenggarakan program / kegiatan program jaminan sosial keluarga, menyusun laporan kegiatan jaminan sosial keluarga serta melakukan koordinasi program kegiatan jaminan sosial keluarga.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanganan Fakir Miskin;
- c. Memverifikasi dan Memvalidasi Data Calon Penerima Bantuan Program Penanganan Fakir Miskin di Perkotaan, Pedesaan Serta Daerah Pesisir dan Pulau Terluar.

Bidang Penanganan fakir Miskin, membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Penanganan Fakir Miskin.

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, mempunyai tugas penanganan jumlah keluarga miskin perkotaan melalui pelatihan KUBE perkotaan;
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaaan, mempuyai tugas penanganan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan KUBE perdesaan;
- c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah pesisir dan pulau terluar, mempunyai tugas penanganan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan KUBE Daerah pesisir dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 (lima) unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 92 tahun 2016 masing-masing sebagai berikut:

- a. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.
 - Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar;
 - Fungsi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Penyusunan Rencana Teknis Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Pelaksanaan Kebijakan Teknis

Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar.

- Daya Tampung 110 Orang.

b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dalam pola Perlindungan dan Penyantunan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma penyusunan rencana teknis operasional Kesejahteraan Sosial Anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional Kesejahteraan Sosial Anak, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Anak;
- Daya tampung 80 anak.

c. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- Daya tampung 80 anak.

d. UPTD Panti Sosial Bina Remaja.

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Remaja Terlantar;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Penyusunan Rencana Teknis Operasional Kesejahteraan Remaja Terlantar, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kesejahteraan Remaja Terlantar, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Remaja Terlantar;
- Daya Tampung Sebanyak 75 Orang.

e. UPTD Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis.

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
- Daya Tampung 35 Orang.

f. UPTD Panti Sosial Penyandang Disabilitas.

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar;
- Daya Tampung 20 Orang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD adalah Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Tenaga Perawat.

- Pekerja Sosial : 7 Orang
- Penyuluh Sosial : 2 Orang
- Perawat : 2 Orang

2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Jumlah sumber daya manusia yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 162 orang dan tenaga kontrak sebanyak 193 orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

a. Berdasarkan Usia

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD sebanyak 162 orang. Laki-laki sebanyak 111 orang atau 68,51% dan perempuan sebanyak 51 orang atau 31,49%.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Jumlah				Jumlah
	26-35	36-45	46-55	>55	
Pria	3	44	44	21	111
Wanita	1	24	16	9	51
Jumlah	4	68	60	30	162

b. Berdasarkan Pendidikan

Dari 162 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD dengan latar belakang pendidikan SD sebanyak 4 orang atau (2,5%), SMP sebanyak 7 orang (4,3%), SLTA sebanyak 73 orang (45.1%), D.I-IV sebanyak 10 orang (6,2%) S.I sebanyak 54 orang (33,3%), S.II sebanyak 14 orang (8,6%) dan S.III sebanyak 0 orang (0,0%).

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jenis Kelamin	Jumlah							Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D. I - IV	S.I	S.II	S.III	
Pria	4	5	53	6	34	10	0	111
Wanita	0	2	20	4	20	4	0	51
Jumlah	4	7	73	10	54	14	0	162

c. Berdasarkan Eselon

Dari 162 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD yang menempati jabatan eselon II sebanyak 0 orang atau (0,0%), eselon III sebanyak 10 orang atau (6,2%), eselon IV sebanyak 17 orang atau (10,5%), jumlah keseluruhan eselon adalah 28 orang atau (17,3%), Pejabat Fungsional sebanyak 22 orang atau (13,6%) dan non eselon sebanyak 112 orang atau (69,1%).

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Jenis Kelamin	Jumlah							Jumlah
	I	II	III	IV	Jumlah Eselon	Fungsional	Non Eselon	
Pria	0	1	6	13	20	12	80	112
Wanita	0	0	4	4	8	10	32	50
Jumlah	0	1	10	17	28	22	112	162

d. Berdasarkan Agama

Berdasarkan agama dari sejumlah 162 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD yang beragama Islam sebanyak 154 orang (95,1%) dan yang bergama Kristen protestan sebanyak 6 orang (3,7%) serta yang bergama Kristen Katolik sebanyak 2 orang (1,2%) .

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

Jenis Kelamin	Jumlah					Jumlah
	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	
Pria	106	5	1	0	0	111
Wanita	48	1	1	0	0	51
Jumlah	154	6	2	0	0	162

2.2.2. Asset / Modal Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dalam upaya mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Sosial perlu ada Asset/Modal yang dimiliki, diantaranya asset Lahan/Tanah, Bangunan, Alat Mesin dan lain-lain.

Tabel 2.5. Data Asset/Modal Lahan/Tanah Dinas Sosial Prov. Kaltim

No	Uraian	Luasa (M2)
1	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	3.328
2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	22.85
3	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	50.8
4	UPTD Panti Sosial Anak Harapan	8.48
5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	27.975
6	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	20.5

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Sosial, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin guna memenuhi kebutuhan dasar PMKS.

Dalam Rencana Program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah di tetapkan Program indikator dari tiap-tiap kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin serta UPTD yang ada di lingkup dinas Sosial Provinsi Kalimantan timur, adapun Program yang di maksud adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel. 2.6. (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun (%) ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan sosial, pelatihan keterampilan UEP melalui KUBE				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100
2	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	95%	95%		200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	100	100	100	100	0
3	Jumlah lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Bantuan Sosial	65%	65%		270	270	270	270	270	270	270	200	270	0	100	100	74	100	0
4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Bantuan Sosial	100%	100%		300	300	300	300	300	300	300	200	300	0	100	100	67	100	0
5	Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial				20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	100	100	100	100	0
6	Jumlah Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	100%	100%		18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	100	100	100	100	0
7	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSBR)				60	60	60	60	60	75	75	75	60	0	125	125	125	100	0
8	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi / Korban Traficcing yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSKW)				0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	100	100	100	0
9	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSAAD)				80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	100	100	100	100	0
10	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSAAH)				80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	100	100	100	100	0
11	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (PSTWNP)				110	110	110	110	110	110	110	110	110	0	100	100	100	100	0
12	Jumlah Fasilitas Manajemen usaha Bagi Keluarga Fakir Miskin/ UEP WRSE				0	0	40	40	40	0	0	40	40	0	0	0	100	100	0
13	Jumlah Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial, Penanganan Korban Bencana, Pasca Bencana, Pemulangan dan Permukiman Orang Terlantar	100%	100%		1518	1518	1518	1518	1518	1755	1942	1130	2500	0	116	128	74	165	0
14	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pelatihan teknis dan fungsional				103	103	103	103	103	103	103	103	103	0	100	100	100	100	0

Tabel. 2.7 (T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	(x Rp. 1000)					(x Rp. 1000)										Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR																	
- Belanja Operasi	48,852,915,000	54,317,939,485	61,155,937,205	71,409,609,021	68,860,051,372	42,278,846,854	47,869,457,893	54,250,663,661	54,250,663,661	-	86.54	88.13	88.71	75.97	-		
- Belanja Modal	1,024,231,000	2,334,862,000	2,097,644,700	12,572,958,650	4,075,504,820	1,014,231,000	2,323,742,750	2,081,479,018	2,081,479,018	-	99.02	99.52	99.23	16.56	-		
JUMLAH	49,877,146,000	56,652,801,485	63,253,581,905	83,982,567,671	72,935,556,192	43,293,077,854	50,193,200,643	56,332,142,679	56,332,142,679	-	92.78	93.83	93.97	46.26	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.4.1. Analisa Renstra K/L

2.4.1.1. Visi dan Misi Kemensos RI

Visi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”** dengan misi : **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”** dengan tujuan : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

2.4.1.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemensos RI

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya good governance Kementerian Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - b. Opini BPK Atas Laporan Keuangan.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang professional dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Sumber Daya Manusiain (SDM) Kesejahteraan yang Tersertifikasi;
 - b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi;
 - c. Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga Dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.

3. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Penurunan Penduduk Miskin;
 - b. Persentase Penurunan Penduduk Rentan.

2.4.1.3. Program Prioritas Kementerian Sosial

Adapun Program Prioritas Kementerian Sosial di Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Program Sembako;
3. Serta program-program lainnya yang menjadi program Kementerian Sosial RI.

2.4.2. Analisa Renstra Kabupaten/Kota

Sesuai dengan visi dan misi masing Pemerintah Kabupaten/Kota maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyelaraskan visi dan misi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dan Kementerian Sosial RI, yang pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan sosial.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota, pemerintah dalam hal ini instansi sosial Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara umum terdiri dari :

1. Pengembangan Model Kelembagaan Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Perlindungan Sosial;
2. Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pelindungan Sosial dan Hukum Bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Tuna Sosial;

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS;
4. Membangun Kerja Sama Kemitraan Antara Pengusaha Dan Kelompok Usaha Fakir Miskin Serta Meningkatkan Kemampuan (*Capacity Building*) Bagi Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lain;
5. Meningkatkan Pelayanan Psikososial dan Pembangunan Pusat Pelayanan Krisis (Trauma Center) Bagi PMKS, Termasuk Korban Bencana Alam Dan Sosial.

Selain pendekatan kebijakan tersebut diatas penyediaan data PMKS yang akurat juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota.

2.4.3. Analisa Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi terluas di Indonesia dengan sumber kekayaan SDA yang melimpah menjadi modal tersendiri dalam melaksanakan pembangunan namun disisi lain kondisi tersebut tidak diiringi dengan pemerataan penduduk, pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai sehingga masih menyebabkan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya hidup, sulitnya akses transportasi dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

a. Analisa Telaahan RTRW.

Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan melalui RT RW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu didukung dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD.

Demikian pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur yang secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW karena ketentuan tersebut akan sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa hal yang perlu di cermati dengan adanya dokumen RTRW ini adalah sebagai berikut:

- Perlunya perhatian pemerintah Kabupaten/Kota khususnya penetapan lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada dikawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi;
- Penetapan Kampung Siaga Bencana (KSB) agar benar-benar berada pada daerah rawan Bencana Alam/Sosial.

b. Analisa Telaahan KLHS

Dalam melaksanakan pelayanan sosial pada masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka kajian lingkungan hidup strategis menjadi perhatian penting dalam Renstra Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur, karena tujuan dari pelayanan sosial adalah peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu

sendiri, oleh karena itu maka pemetaan lokasi-lokasi pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kampung Siaga Bencana (KSB) ataupun panti-panti sosial harus dikembangkan dengan pola sinergitas dengan alam sekitarnya serta mengedepankan kearifan lokal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Perencanaan pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Renstra Provinsi Kaltim telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan sosial dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Tiap Bidang dan UPTD Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Rehabilitasi Sosial	a. Belum optimalnya sinergitas program-program penyelenggaraan rehabilitasi sosial;	Kurangnya sinergitas penanganan rehabilitasi sosial antara kab/kota dan provinsi	Beberapa penanganan rehabilitasi sosial tidak dapat disinergikan antara kab/kota dan provinsi	Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial pada berbagai sektor dan level (Kab/Kota & Prov.) masih belum optimal
	b. Program dan kegiatan terkait bantuan sosial belum sepenuhnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);	Kurang maksimalnya penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	Masih ditemukannya data penerima bantuan sosial yang belum akurat	Pemutahiran data di Kab/Kota tidak dilakukan secara berkala
	c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti belum optimal;	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai SPM belum optimal	Kurangnya SDM dan minimnya sarana dan sarana pendukung	Belum maksimalnya Sumber Daya Aparatur dan ketersediaan sarana/prasarana rehabilitasi sosial didalam panti (Pemerintah dan LKS Panti swasta)

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Pemberdayaan Sosial	a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum maksimalnya sosialisasi ke masyarakat terkait kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum maksimalnya penyusunan program sosialisasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat
	b. Rendahnya partisipasi Lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan kesejahteraan sosial;	Belum optimalnya partisipasi LKS untuk penanganan Kesejahteraan Sosial	Kurang nya kapasitas SDM yang menjadi pengurus LKS	Kurang nya pembinaan peningkatan kapasitas SDM LKS melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKS
	c. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Kurangnya pemanfaatan dan pendayagunaan PSKS maka menyebabkan data DTKS kurang valid dan penanganan masalah kesejahteraan sosial kurang optimal	Kurang nya kapasitas SDM dan lemahnya koordinasi antara sesama PSKS dan Pemerintah serta ke LKS yang ada	Kurangnya perhatian pemerintah dari segi anggaran untuk peningkatan kapasitas PSKS dan untuk kesejahteraan PSKS sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap PSKS atau pilar-pilar sosial.
	d. Rendahnya keterlibatan dunia usaha (CSR) Kessos dalam penanganan Kesejahteraan Sosial.	Rendahnya keterlibatan dunia usaha (CSR) maka mengurangi peranan dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Kurangnya penegasan sanksi atau punishment terhadap dunia usaha yang tidak mengeluarkan dana CSR nya pada masyarakat	Regulasi yang ada belum cukup kuat karna tidak di berikan sanksi bagi pelanggar aturan untuk peran CSR sehingga bisa memaksimalkan peran dunia CSR dalam penanganan masalah kessos.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Verifikasi dan Validasi belum maksimal ditingkat Kab/Kota sehingga Pemberian Bantuan Sosial tidak tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan Validasi Data Penerima yang tidak update. 2. DTKS belum menjadi dasar pemberian bantuan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering terjadi pergantian Petugas/operator verifikasi dan validasi Data ditingkat Kabupaten dan Kota 2. Minimnya informasi tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perekrutan Petugas/operator verifikasi dan validasi Data yang mumpuni pada kabupaten/kota belum terpenuhi.(kurang) 2. Kurangnya Sosialisasi tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ditingkat Provinsi,Kab/Kota /Kecamatan dan Kelurahan
	Perlunya peningkatan keberdayaan berusaha bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah graduasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberdayaan berusaha masih mengandalkan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan dana yang kecil tanpa alternative pihak lain / swasta/perusahaan 2. Validitas data KPM yg berusaha masih minim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah besaran bantuan KUBE dan UEP untuk berusaha sudah ditetapkan secara aturan penganggaran Pemerintah Daerah. 2. Informasi Data KPM penerima bantuan berusaha tidak update ditingkat pemerintah daerah kab/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUBE dan UEP untuk berusaha tidak dapat bersaing dalam pasar. 2. Tidak ada Pengawasan KUBE dan UEP yang telah diberikan bantuan berusaha oleh Pemerintah Daerah

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	Perlunya akselerasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Data pilah penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan tidak tersedia.	Perolehan Data penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan terkendala masalah teknis.	Pemerintah Daerah Belum diberikan akses melalui teknis aplikasi untuk memperoleh/memperbaiki data PBI Jaminan Kesehatan.
	Ketersediaan peralatan Dapur umum Lapangan dan kelengkapannya belum terpenuhi	Kejadian kebencanaan bersifat tidak terprediksi/tidak pasti yang berdampak pada alokasi anggaran terkait kebencanaan.	Minimnya informasi oleh Pemerintah Daerah mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait kebencanaan .	Standar Pelayanan Minimal (SPM)terkait kebencanaan belum menjadi pedoman dalam penanganan Kebencanaan di Daerah.
Bidang Penanganan Fakir Miskin	a. Belum optimalnya penanganan Fakir Miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis / luas wilayah;	Sulitnya pelaksanaan kegiatan verifikasi data penerima program penanganan fakir miskin serta sulitnya akses internet khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar	a. Luasnya jangkauan wilayah pesisir dan pulau terluar di wilayah prov.Kaltim dan masih terdapatnya blankspot di beberapa daerah tersebut. b. Dukungan sarana dan prasarana masih kurang sehingga diperlukan dana sharing dengan Dinas sosial Kab/kota untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.	Masih banyak warga kategori miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terjangkau program penanganan fakir miskin, terutama wilayah pesisir dan pulau terluar oleh karena itu agar program penanganan fakir miskin dan menjangkau seluruh wilayah perlu didukung dana dan anggaran yang memadai.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	<p>b. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyaluran bantuan non tunai menjadi tunai pada program sembako;</p>	<p>a. Kurangnya koordinasi dan informasi dari Kemensos RI ke Dinas Sosial Prov Kaltim terkait penyaluran bantuan sosial program sembako yang disalurkan di Kab/kota, saat ini kementerian langsung menginformasikan kepada PT.POS maupun HIMBARA terkait kegiatan penyaluran bantuan.</p> <p>b. Kurangnya informasi terkait penyaluran bantuan sosial program sembako melalui PT Pos dan Himbara</p> <p>c. Tidak mendapat BNBA bagi calon penerima bantuan program sembako untuk dilakukan evaluasi realisasi penyaluran</p>	<p>PT Pos Indonesia maupun Himbara menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada kementerian sosial RI tanpa memberikan tembusan kepada Dinas Sosial Prov.Kaltim.</p>	<p>Kurangnya koordinasi Kementerian Sosial RI dan Himbara dalam menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan program sembako, mengakibatkan terkendalanya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas sosial provinsi kalimantan Timur.</p>

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	<p>c. Sulitnya akses DTKS pada tingkat pusat (Kementerian);</p>	<p>Aplikasi SIKS-NG yang berisi DTKS tidak dapat mengakses BNBA (by name by address) dan hanya dapat mengakses jumlah kumulatif warga miskin di kab/kota yang masuk ke dalam DTKS sehingga apabila Dinas Sosial Prov.Kaltim memerlukan BNBA (by name by address) Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Prov.Kaltim bersurat kepada Pusdatin Kementerian Sosial RI dengan di tandatangi oleh Gubernur Kalimantan Timur.</p>	<p>Kementerian sosial RI saat ini masih memperbaiki aplikasi SIKS-NG (Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial -Next Generation) sehingga belum dapat melayani permintaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Data terakhir yang diterima oleh Dinas Sosial Prov Kaltim adalah DTKS periode 25 November 2021</p>	<p>Angka kemiskinan di Kalimantan Timur bergerak secara dinamis dan mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat, kementerian sosial RI merilis DTKS melalui aplikasi SIKS-NG secara periodik (per Bulan) dan DTKS dapat berubah sementara itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan sebagai data penerima program bantuan sosial di tingkat pusat daerah dan Kab/kota.</p>

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	d. Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota.	Kurang maksimalnya pendampingan dalam program pemberian bantuan sosial kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dalam memotivasi KPM untuk mandiri dalam berusaha, sehingga usaha yang dijalani kurang berkembang	Belum adanya dana sharing dari dinas sosial Kab/kota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi penerima program bantuan KUBE dan WRSE dalam menjalankan usahanya agar lebih maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.	Perlunya dukungan anggaran (dana Sharing) dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Kab/kota untuk memberikan pendampingan terhadap KPM penerima bantuan dalam mengembangkan usaha.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
1	<p>a. Belum optimalnya sinergitas program-program penyelenggaraan rehabilitasi sosial;</p> <p>b. Program dan kegiatan terkait bantuan sosial belum sepenuhnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);</p> <p>c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti belum optimal;</p>	<p>1 Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);</p> <p>2 Perlunya peningkatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berbasis data.</p>	<p>Ketersediaan Data</p> <p>1 PMKS Program-program</p> <p>2 Inovatif dalam penanganan PMKS Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam</p> <p>3 rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersedianya sarana dan prasarana</p> <p>4 pendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>	<p>1 Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>2 Dukungan Pemerintah Pusat dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam hal verifikasi & validasi data</p> <p>3 Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam hal penanganan PMKS</p>

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
2	a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	3 Bantuan sosial yang berbasis Perlindungan Sosial Keluarga masih menjadi model dalam penanganan PMKS;	5 Ketersediaan SOP Pelayanan dan sistem monev berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	4 Koordinasi yang berkesinambungan dengan berbagai sektor terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	b. Rendahnya partisipasi Lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan kesejahteraan sosial;	4 Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;	6 Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
	c. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	5 Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya;	7 Tersedianya penganggaran yang cukup dalam penanganan PMKS	

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
3	<p>a. Verifikasi dan validasi belum maksimal ditingkat Kab/Kota sehingga Pemberian Bansos tidak tepat</p> <p>b. Perlunya peningkatan keberdayaan berusaha bagi KPM yang telah graduasi.</p> <p>c. Perlunya akselerasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemprov & Kab/Kota</p> <p>d. Ketersediaan peralatan Dapur umum Lapangan dan kelengkapannya belum terpenuhi</p>	6 Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PMKS baru;		

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
4	<p>a. Belum optimalnya penanganan Fakir Miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis / luas wilayah;</p> <p>b. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyaluran bantuan non tunai menjadi tunai pada program sembako;</p> <p>c. Sulitnya akses DTKS pada tingkat pusat (Kementerian);</p>			

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
	d. Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota.			

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diatas, maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatur dan PSKS);
2. Peningkatan sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan unit kerja penganggaran (Bappeda, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah, DPRD.);
3. Peningkatan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait;
4. Pemanfaatan data Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara optimal;
5. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penanganan PMKS.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2024 - 2026 permasalahan pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tertanganinya PMKS sebanyak 36 % per- 3 (tiga) tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya migrasi PMKS ▪ Belum lengkapnya (PERDA) yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewenangan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS
2.	36% PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengurus dirinya sendiri, mampu menjalin relasi sosial yang harmonis, memiliki kemandirian ekonomi, melaksanakan peran sosial, mampu berfungsi secara fisik, mampu menghadapi situasi kritis dan mampu berintegrasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana ▪ Kurangnya kuantitas/jumlah personil SDM Kesejahteraan Sosial ▪ Belum proporsionalnya alokasi anggaran kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan keahlian dan keterampilan penduduk local dan pendatang ▪ Lemahnya koordinasi lintas sector terhadap pelayanan PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial ▪ Program-program kesejahteraan sosial yang adaptable.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tertanganinya PMKS sebanyak 36% per tiga tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya migrasi PMKS ▪ Belum lengkapnya (PERDA) yang mengatur tentang kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewenangan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS
2.	36% PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengurus dirinya sendiri, mampu menjalin relasi sosial yang harmonis, memiliki kemandirian ekonomi, melaksanakan peran sosial, mampu berfungsi secara fisik, mampu menghadapi situasi kritis dan mampu berintegrasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana ▪ Kurangnya kuantitas/jumlah personil SDM Kesejahteraan Sosial ▪ Belum proporsionalnya alokasi anggaran kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan keahlian dan keterampilan penduduk local dan pendatang ▪ Lemahnya koordinasi lintas sektor terhadap pelayanan PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial ▪ Program-program kesejahteraan sosial yang adaptable.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kampung Siaga Bencana	Keterbatasan anggaran	Luasnya jangkauan pelayanan	Komitmen kepala daerah

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kampung Siaga Bencana	Daerah rawan bencana yang tersebar luas	Program CSR belum berjalan dengan baik	Komitmen Kepala Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Perlunya peningkatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berbasis data;
3. Bantuan sosial yang berbasis Perlindungan Sosial Keluarga masih menjadi model dalam penanganan PMKS;

4. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
5. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PMKS baru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan) serta sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tiap perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran Pada Tahun Ke -		
					2024	2025	2026
1.	Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12	12	12
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86.10	86.60	87.10

Tabel 4.2. Program, Sasaran Program dan Target Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	TERLAKSANANYA LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	4 PSKS	36%	64%	100%
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	15 Dok	15 Dok	15 Dok
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah izin PUB melalui aplikasi online yang tertata dengan baik dan sesuai aturan	-	15 Dok	15 Dok	15 Dok
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	4 PSKS	4 PSKS
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	-	40 Orang	40 Orang	40 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	-	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	237 Lembaga	237 Lembaga	237 Lembaga

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	-	5.31%	5.40%	5.80%
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Terlaksananya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	28 Orang	7.700 Orang	7.700 Orang	7.700 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar Permakanan per orang sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 Orang	7.630 Orang	7.630 Orang	7.630 Orang
Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi Yang Dipulangkan ke Daerah Asal	28 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	20 Dok	20 Dok	20 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	110 Orang	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Meningkatnya Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Terlaksananya PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Meningkatnya Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya orang yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Terlaksananya PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Meningkatnya Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Terlaksananya peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	75 Orang	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Meningkatnya Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	75 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minima Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	35 Orang	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti (UPTD PSKW-HM)	Meningkatnya PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Pemulangan Ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	-	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (UPTD DISABILITAS)	Meningkatnya Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial (UPTD DISABILITAS)	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial (UPTD DISABILITAS)	-	30	50	50
Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Penyediaan Sandang	Terlaksananya Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	30	50	50

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	440 Orang	12,936 Orang	12,936 Orang	12,936 Orang
Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	18 Orang	18 Orang	18 Orang
Pengangkatan Anak Antar WNI	Terlaksananya pengangkatan Anak oleh Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang
Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	3 Orang	3 Orang	3 Orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	440 Orang	12,918 Orang	12,918 Orang	12,918 Orang
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi	-	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan data, Monev dan Rapat Koordinasi	440 Orang	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	2.500 Orang	100 %	100 %	100 %
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	2.500 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	2.500 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tangga Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	2.500 Orang	1,000 Orang	1,000 Orang	1,000 Orang
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewngn Prov	-	1,000 Orang	1,000 Orang	1,000 Orang
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	900 Orang	900 Orang	900 Orang
Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya palayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	-	600 Orang	600 Orang	600 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terlaksananya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 TMP	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinsos)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	3 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Lap	2 Lap	2 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	2 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang	165 Orang	165 Orang	165 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	4 Lap	4 Lap	4 Lap
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan yang disusun pada kegiatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3 Dok	3 Dok	3 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersusunnya Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	200 Unit	250 Unit	300 Unit
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersusunnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	312 Unit	322 Unit	327 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	305 Unit	315 Unit	320 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	35 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	53 Unit	73 Unit	84 Unit	95 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
(UPTD PSPAD)						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Tersusunnya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeulair	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Terlaksananya Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang sediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	39 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	26 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksananya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersusunnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	312 Unit	322 Unit	327 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	1 Unit	305 Unit	305 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Strategi pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS dalam Panti Pemerintah dan Panti Swasta
		2. Meningkatkan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya proses adopsi anak untuk mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ▪ Peningkatan kualitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana	Meningkatkan Bantuan bagi Korban Pasca Bencana Alam dan Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan rekomendasi dalam rangka izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) ▪ Peningkatan Kualitas SDM dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
		5. Meningkatkan nilai-nilai Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
		Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasana dalam rangka menjunjung akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasana dalam rangka menjunjung akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan terjabar secara terperinci dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 Tahun mendatang yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
- e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2024-2026, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada sasaran RPD yakni Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sampai pada level 12 %. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut maka ditetapkan 6 (enam) program yang merupakan program pendukung.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pembinaan pengelolaan administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan sumber daya manusia aparatur agar dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS yang dituangkan dalam kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini merupakan program yang diarahkan pada upaya penggalan pendayagunaan, dan pengembangan potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial (PSKS), yang berasal dari kalangan masyarakat melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

2. Pelayanan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini merupakan program anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, pemberian bantuan kepada para penyandang disabilitas, pemberian bantuan kepada eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit lainnya melalui kegiatan di dalam dan luar panti melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Pemulasaraan;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.

4. Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal;

5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Pemulangan ke Daerah Asal;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini merupakan Program pemberian bantuan bagi keluarga fakir miskin melalui KUBE dan UEP WRSE dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program ini mempunyai kegiatan serba sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
Penyediaan Permakanan;
 - Pengangkatan Anak Antar WNI;
 - Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan Penanganan dan Penanggulangan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial, program ini mempunyai kegiatan serba sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- Pelayanan Dukungan Psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini merupakan pengelolaan, rehabilitasi taman makam pahlawan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

Tabel. 6.1 (Tabel. TC. 27) Rencana Program dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	1.06.02	PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	4 PSKS	36%	1,402,683,180	64%	2,264,821,498	100%	3,126,303,649	100%	6,793,808,327	Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	15 Dokumen	100,000,000	15 Dokumen	250,000,000	15 Dokumen	400,000,000	15 Dokumen	750,000,000	
		1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	15 Dokumen	100,000,000	15 Dokumen	250,000,000	15 Dokumen	400,000,000	45 Dokumen	750,000,000	
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	1,302,683,180	4 PSKS	2,014,821,498	4 PSKS	2,726,303,649	4 PSKS	6,043,808,327	
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	-	40 Orang	184,122,300	40 Orang	302,534,530	40 Orang	422,787,983	40 Orang	909,444,813	
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	105 Orang	630,844,280	105 Orang	893,928,708	105 Orang	1,183,321,579	105 Orang	2,708,094,567	
		1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	10 Keluarga	284,424,050	10 Keluarga	494,846,455	10 Keluarga	674,331,101	10 Keluarga	1,453,601,606	
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	237 Lembaga	203,292,550	237 Lembaga	323,511,805	237 Lembaga	445,862,986	237 Lembaga	972,667,341	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PM KS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	36%	5.31 %	21,216,722,409	5.4 %	23,338,394,650	5.8%	25,672,234,115	5.8 %	70,227,351,174	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	28 Orang	7.700 Orang	21,216,722,409	7.700 Orang	23,338,394,650	7.700 Orang	25,672,234,115	23.100 Orang	70,227,351,174	
		1.06.04.1.05.05	Penyediaan Perumahan	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi	28 Orang	7630 Orang	16,144,000,000	7630 Orang	17,758,400,000	7630 Orang	19,534,240,000	22.890 Orang	53,436,640,000	
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS kewenangan Provinsi yang dipulangkan ke daerah asal	28 Orang	70 Orang	425,000,000	70 Orang	467,500,000	70 Orang	514,250,000	210 Orang	1,406,750,000	
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	20 Dok	4,647,722,409	20 Dok	5,112,494,650	20 Dok	5,623,744,115	60 Dok	15,383,961,174	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resnra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW -NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti (%)	110 Orang	100%	3,281,612,070	100%	3,609,773,277	100%	4,341,878,275	100%	11,233,263,622	UPTD PSTW - NP
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW -NP)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW -NP)	110 Orang	126 Orang	3,281,612,070	126 Orang	3,609,773,277	126 Orang	4,341,878,275	126 Orang	11,233,263,622	
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	2,579,934,500	126 Orang	2,837,927,950	126 Orang	2,800,000,000	126 Orang	8,217,862,450	
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	28,248,000	126 Orang	31,072,800	126 Orang	93,500,880	126 Orang	152,821,680	
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	93,778,300	126 Orang	103,156,130	126 Orang	310,406,173	126 Orang	507,340,603	
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	162,529,070	126 Orang	178,781,977	126 Orang	537,971,222	126 Orang	879,282,269	
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	336,270,000	126 Orang	369,897,000	126 Orang	500,000,000	126 Orang	1,206,167,000	
		1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	80,852,200	126 Orang	88,937,420	126 Orang	100,000,000	126 Orang	269,789,620	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	2,563,000,000	100%	2,819,300,000	100%	3,101,230,000	100%	8,483,530,000	UPTD PSPAD
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	2,563,000,000	80 Orang	2,819,300,000	80 Orang	3,101,230,000	80 Orang	8,483,530,000	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	1,766,600,000	80 Orang	1,943,260,000	80 Orang	2,137,586,000	80 Orang	5,847,446,000	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	543,290,000	80 Orang	597,619,000	80 Orang	657,380,900	80 Orang	1,798,289,900	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	83,490,000	80 Orang	91,839,000	80 Orang	101,022,900	80 Orang	276,351,900	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	84,810,000	80 Orang	93,291,000	80 Orang	102,620,100	80 Orang	280,721,100	
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	80 Orang	84,810,000	80 Orang	93,291,000	80 Orang	102,620,100	80 Orang	280,721,100	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	2,650,957,000	100%	2,650,957,000	100%	3,027,127,750	100%	8,329,041,750	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 Orang	80 Orang	2,650,957,000	80 Orang	2,650,957,000	80 Orang	3,027,127,750	80 Orang	8,329,041,750	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	1,843,457,000	80 Orang	1,843,457,000	80 Orang	2,209,677,750	80 Orang	5,896,591,750	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	348,000,000	80 Orang	348,000,000	80 Orang	348,000,000	80 Orang	1,044,000,000	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	80 Orang	199,500,000	80 Orang	199,500,000	80 Orang	209,450,000	80 Orang	608,450,000	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	110,000,000	80 Orang	110,000,000	80 Orang	110,000,000	80 Orang	330,000,000	
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	150,000,000	80 Orang	150,000,000	80 Orang	150,000,000	80 Orang	450,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	75 Orang	100%	1,726,377,346	100%	1,864,487,534	100%	2,013,646,537	100%	5,604,511,417	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	75 Orang	105 Orang	1,726,377,346	105 Orang	1,864,487,534	105 Orang	2,013,646,537	105 Orang	5,604,511,417	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	60 Orang	105 Orang	706,036,500	105 Orang	762,519,420	105 Orang	823,520,974	105 Orang	2,292,076,894	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	105 Orang	114,933,600	105 Orang	124,128,288	105 Orang	134,058,551	105 Orang	373,120,439	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	24,937,200	105 Orang	26,932,176	105 Orang	29,086,750	105 Orang	80,956,126	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	726,462,046	105 Orang	784,579,010	105 Orang	847,345,331	105 Orang	2,358,386,387	
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	154,008,000	105 Orang	166,328,640	105 Orang	179,634,931	105 Orang	499,971,571	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	35 Orang	100%	576,609,000	100%	734,011,000	100%	797,411,000	100%	2,108,031,000	UPTD PSKW-HM
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PSKW - HM)	35 Orang	35 Orang	576,609,000	35 Orang	734,011,000	35 Orang	797,411,000	35 Orang	2,108,031,000	
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	313,830,000	35 Orang	448,645,000	35 Orang	483,509,000	35 Orang	1,245,984,000	
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	220,000,000	35 Orang	242,000,000	35 Orang	266,200,000	35 Orang	728,200,000	
		1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	5,874,000	35 Orang	6,461,000	35 Orang	7,107,000	35 Orang	19,442,000	
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	10 Orang	36,905,000	10 Orang	36,905,000	10 Orang	40,595,000	35 Orang	114,405,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PANTI DISABILITAS)	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	867,217,170	100%	1,754,038,887	100%	2,754,038,887	100%	5,375,294,944	UPTD DISABILITAS
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (UPTD DISABILITAS)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISABILITAS)	-	30 Orang	867,217,170	50 Orang	1,754,038,887	50 Orang	2,754,038,887	130 Orang	5,375,294,944	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	-	30 Orang	688,375,000	50 Orang	1,007,712,500	50 Orang	2,007,712,500	130 Orang	3,703,800,000	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	-	30 Orang	139,285,000	50 Orang	353,213,500	50 Orang	353,213,500	130 Orang	845,712,000	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	-	30 Orang	9,984,000	50 Orang	210,982,400	50 Orang	210,982,400	130 Orang	431,948,800	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	30 Orang	25,573,170	50 Orang	38,130,487	50 Orang	38,130,487	130 Orang	101,834,144	
		1.06.04.1.02.08	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	30 Orang	4,000,000	50 Orang	144,000,000	50 Orang	144,000,000	130 Orang	292,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang memiliki Usaha Ekonomoi Produktif (UEP)	440 Orang	12,936 Orang	18,375,516,000	12,936 Orang	20,165,409,860	12,936 Orang	21,001,947,346	38,808 Orang	59,542,873,206	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	18 Orang	658,711,000	18 Orang	924,585,000	18 Orang	1,197,040,000	54 Orang	2,780,336,000	
		1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	15 Orang	508,711,000	15 Orang	659,585,000	15 Orang	715,540,000	45 Orang	1,883,836,000	
		1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	3 Orang	150,000,000	3 Orang	265,000,000	3 Orang	481,500,000	9 Orang	896,500,000	
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	440 Orang	12.918 Orang	17,716,805,000	12.918 Orang	19,240,824,860	12.918 Orang	19,804,907,346	38.754 Orang	56,762,537,206	
		1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi	-	3,105 Keluarga	12,955,000,000	3,105 Keluarg a	13,999,985,000	3,105 Keluar ga	14,189,983,500	9,315 Keluarg a	41,144,968,500	
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan data, Monev dan Rapat Koordinasi	440 Orang	3,105 Keluarga	2,261,805,000	3,105 Keluarg a	2,740,839,860	3,105 Keluar ga	3,014,923,846	9,315 Keluarg a	8,017,568,706	
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi	-	500 Orang	2,500,000,000	500 Orang	2,500,000,000	500 Orang	2,600,000,000	1.500 Orang	7,600,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	2.500 Orang	100 %	11,986,306,500	100 %	13,112,807,150	100 %	13,703,430,865	100 %	38,802,544,515	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	2.500 Orang	17,870 Orang	11,986,306,500	17,870 Orang	13,112,807,150	17,870 Orang	13,703,430,865	53,610 Orang	38,802,544,515	
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	2.500 Orang	17,870 Orang	7,077,752,000	17,870 Orang	9,004,676,200	17,870 Orang	9,184,486,820	17,870 Orang	25,266,915,020	
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	2.500 Orang	1,000 Orang	405,000,000	1,000 Orang	482,900,000	1,000 Orang	531,190,000	3,000 Orang	1,419,090,000	
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	-	1,000 Unit	1,971,021,500	1,000 Unit	2,120,729,050	1,000 Unit	2,332,801,955	3,000 Unit	6,424,552,505	
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	900 Orang	1,100,365,500	900 Orang	494,054,000	900 Orang	543,459,400	2,700 Orang	2,137,878,900	
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	-	600 Orang	1,432,167,500	600 Orang	1,010,447,900	600 Orang	1,111,492,690	1,800 Orang	3,554,108,090	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 TMP	1 Lokasi	637,332,310	1 Lokasi	1,337,715,541	1 Lokasi	1,707,487,095	1 Lokasi	3,682,534,946	Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1 Lokasi	637,332,310	1 Lokasi	1,337,715,541	1 Lokasi	1,707,487,095	1 Lokasi	3,682,534,946	
		1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dok	1 Dokumen	296,332,310	1 Dokumen	455,215,541	1 Dokumen	519,987,095	1 Dokumen	1,271,534,946	
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Makam	185,000,000	1 Makam	390,000,000	1 Makam	595,000,000	1 Makam	1,170,000,000	
		1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Tenaga pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Laporan	156,000,000	1 Laporan	492,500,000	1 Laporan	592,500,000	1 Laporan	1,241,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1.06.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	100 %	82%	46,416,830,431	84%	45,473,288,414	86%	49,647,550,043	86%	141,537,668,888	Bidang Sekretariat
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	2,829,067,350	3 Lap	1,219,480,718	3 Lap	1,466,954,753	15 Lap	5,495,502,821	
		1.06.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	7 Dok	2,479,067,350	7 Dok	869,480,718	7 Dok	916,954,753	7 Dok	4,265,502,821	
		1.06.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	
		1.06.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 Dok	250,000,000	2 Dok	250,000,000	2 Dok	350,000,000	6 Dok	850,000,000	
		1.06.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Lap	100,000,000	5 Lap	100,000,000	5 Lap	200,000,000	15 Lap	400,000,000	
		1.06.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Lap	10,000,000	2 Lap	10,000,000	2 Lap	10,000,000	4 Lap	10,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	2 Lap	2 Lap	33,993,070,889	2 Lap	37,684,005,334	2 Lap	38,613,205,600	2 Lap	110,350,281,823	Bidang Sekretariat
		1.06.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	165 Orang	165 Orang	29,519,460,417	165 Orang	31,991,714,338	165 Orang	32,491,300,055	165 Orang	94,002,474,810	
		1.06.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	2 Dok	4,373,610,472	2 Dok	5,592,290,996	2 Dok	5,821,905,545	6 Dok	15,787,807,013	
		1.06.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	30,000,000	
		1.06.01.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	30,000,000	
		1.06.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	4 Lap	100,000,000	4 Lap	100,000,000	4 Lap	300,000,000	12 Lap	500,000,000	
		1.06.01.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	30,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-	1 Lap	30,000,000	1 Lap	30,000,000	1 Lap	30,000,000	3 Lap	90,000,000	Bidang Sekretariat
		1.06.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	3 Dok	30,000,000	
		1.06.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	3 Dok	30,000,000	
		1.06.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	3 Lap	30,000,000	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	3 lap	3 lap	172,000,000	3 lap	172,600,000	3 lap	660,230,000	9 lap	1,004,830,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	162 Stell	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	300,000,000	3 Paket	500,000,000	
		1.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	250,000,000	6 Dok	350,000,000	
		1.06.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3 Dok	10,000,000	3 Dok	10,000,000	3 Dok	10,000,000	9 Dok	30,000,000	
		1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	12,000,000	5 Orang	12,600,000	5 Orang	100,230,000	5 Orang	124,830,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resnra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Lap	5 Lap	2,496,358,880	5 Lap	2,623,176,825	5 Lap	3,628,131,556	15 Lap	8,747,667,261	Bidang Sekretariat
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	167,903,450	1 Paket	176,298,623	1 Paket	285,113,554	4 Paket	629,315,627	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	342,674,200	1 Paket	359,807,910	1 Paket	577,798,306	4 Paket	1,280,280,416	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	324,111,150	1 Paket	340,316,708	1 Paket	557,332,543	4 Paket	1,221,760,401	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1 Lap	1,601,670,080	1 Lap	1,686,753,584	1 Lap	2,047,887,153	4 Lap	5,336,310,817	
		1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (laporan)	-	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	150,000,000	3 Dok	250,000,000	
		1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	3 Dok	30,000,000	
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	3 Lap	4,650,707,912	3 Lap	1,382,618,867	3 Lap	1,806,051,131	9 Lap	7,839,377,910	
		1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	4,050,707,912	1 Unit	1,013,973,574	1 Unit	1,113,973,574	3 Unit	6,178,655,060	
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	250,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	200,000,000	3 Paket	550,000,000	
		1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35 Unit	30 Unit	350,000,000	30 Unit	268,645,293	30 Unit	492,077,557	90 Unit	1,110,722,850	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	2 Lap	562,830,300	2 Lap	590,471,815	2 Lap	919,495,406	2 Lap	2,102,797,521	Bidang Sekretariat
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	1 Lap	66,556,600	1 Lap	69,884,430	1 Lap	173,378,652	3 Lap	309,819,682	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	486,273,700	1 Lap	510,587,385	1 Lap	736,116,754	3 Lap	1,732,977,839	
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	3 Lap	30,000,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Lap	4 Lap	1,782,795,100	4 Lap	1,870,934,855	4 Lap	2,523,481,597	4 Lap	6,177,211,552	
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit	5 Unit	77,161,700	5 Unit	81,019,785	5 Unit	185,070,774	15 Unit	343,252,259	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	5 Unit	33,330,000	5 Unit	34,996,500	5 Unit	96,746,325	15 Unit	165,072,825	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	200 Unit	825,746,900	250 Unit	867,034,245	300 Unit	1,110,385,957	750 Unit	2,803,167,102	
		1.06.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	3 Unit	30,000,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	826,556,500	1 Unit	867,884,325	1 Unit	1,111,278,541	3 Unit	2,805,719,366	
		1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	3 Unit	30,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resnra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW -NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	-	82 %	3,645,162,930	84%	4,019,678,723	86 %	4,060,519,725	86 %	11,425,361,378	UPTD PSTW-NP		
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000			
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW -NP)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	2,125,968,240	1 Lap	2,338,565,064	1 Lap	2,201,293,900	3 Lap	6,665,827,204			
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	2,125,968,240	1 Dok	2,338,565,064	1 Dok	2,201,293,900	3 Dok	6,665,827,204			
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW -NP)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	59,980,690	1 Keg	65,978,759	1 Keg	72,576,635	3 Keg	198,536,084			
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	59,980,690	1 Paket	65,978,759	1 Paket	72,576,635	3 Paket	198,536,084			
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW -NP)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	774,959,320	4 Keg	852,454,752	4 Keg	937,701,027	12 Keg	2,565,115,099			
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,565,010	1 Paket	18,221,511	1 Paket	20,043,662	3 Paket	54,830,183			
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	504,909,130	1 Paket	555,400,043	1 Paket	610,940,047	3 Paket	1,671,249,220			
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32,385,180	3 Paket	35,623,198	3 Paket	39,186,318	9 Paket	107,194,696			
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	221,100,000	1 Lap	243,210,000	1 Lap	267,531,000	4 Lap	731,841,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW -NP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	269,916,680	2 Lap	296,908,348	2 Lap	326,599,183	6 Lap	893,424,211	UPTD PSTW -NP		
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	263,161,800	1 Lap	289,477,980	1 Lap	318,425,778	3 Lap	871,065,558			
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	6,754,880	1 Lap	7,430,368	1 Lap	8,173,405	3 Lap	22,358,653			
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW -NP)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	312 Unit	514,338,000	322 Unit	565,771,800	327 Unit	622,348,980	661 Unit	1,702,458,780			
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	122,545,500	6 Unit	134,800,050	6 Unit	148,280,055	18 Unit	405,625,605			
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	305 Unit	171,792,500	315 Unit	188,971,750	320 Unit	207,868,925	640 Unit	568,633,175			
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	3 Unit	728,200,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resnra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kuantitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA	-	82 %	2,575,436,000	84 %	2,842,980,000	86 %	3,137,277,000	86 %	8,255,693,000	UPTD PSPAD
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1,381,561,192	1 Lap	1,519,717,312	1 Lap	1,671,689,044	3 Lap	4,572,967,548	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1,381,561,192	1 Lap	1,519,717,312	1 Lap	1,671,689,044	3 Lap	4,572,967,548	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Keg	2 Keg	193,500,000	2 Keg	212,850,000	2 Keg	234,135,000	6 Keg	640,485,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	64,500,000	1 Paket	70,950,000	1 Paket	78,045,000	3 Paket	213,495,000	
		1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	35 Orang	43 Orang	129,000,000	50 Orang	141,900,000	60 Orang	156,090,000	60 Orang	426,990,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	442,867,108	4 Keg	487,154,218	4 Keg	535,868,639	12 Keg	1,465,889,965	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11,000,550	1 Paket	12,100,605	1 Paket	13,310,666	3 Paket	36,411,821	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	140,370,230	1 Paket	154,407,253	1 Paket	169,847,979	3 Paket	464,625,462	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9,016,328	3 Paket	9,918,360	3 Paket	10,909,194	9 Paket	29,843,882	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	282,480,000	1 Lap	310,728,000	1 Lap	341,800,800	3 Paket	935,008,800	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	329,200,000	2 Lap	362,120,000	2 Lap	398,332,000	6 Lap	1,089,652,000	UPTD PSPAD
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	2,200,000	1 Lap	2,420,000	1 Lap	2,662,000	3 Lap	7,282,000	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	327,000,000	1 Lap	359,700,000	1 Lap	395,670,000	3 Lap	1,082,370,000	
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Unit	3 Unit	105,000,000	4 Unit	115,500,000	5 Unit	127,050,000	12 Unit	347,550,000	
		1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	105,000,000	4 Unit	115,500,000	5 Unit	127,050,000	12 Unit	347,550,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	53 Unit	73 Unit	223,307,700	84 Unit	245,638,470	95 Unit	270,202,317	252 Unit	739,148,487	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	154,942,700	4 Unit	170,436,970	5 Unit	187,480,667	12 Unit	512,860,337	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70 Unit	68,365,000	70 Unit	75,201,500	70 Unit	82,721,650	210 Unit	226,288,150	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	-	82 %	3,015,917,000	84 %	3,011,323,000	86 %	3,261,379,250	86 %	8,988,619,250	UPTD PSAAH
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,882,849,500	3 Lap	5,298,449,500	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,882,849,500	3 Lap	5,298,449,500	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	150,917,000	1 Keg	150,917,000	1 Keg	165,000,000	3 Keg	466,834,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	150,917,000	1 Paket	150,917,000	1 Paket	165,000,000	3 Paket	466,834,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	512,200,000	4 Keg	507,606,000	4 Keg	508,606,000	12 Keg	1,528,412,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	60,000,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	3 Paket	450,000,000	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23,000,000	1 Paket	18,406,000	1 Paket	18,406,000	3 Paket	59,812,000	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	319,200,000	1 Lap	319,200,000	1 Lap	320,200,000	3 Lap	958,600,000	
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	2 Unit	75,500,000	2 Unit	75,500,000	2 Unit	85,388,750	6 Unit	236,388,750	
		1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	55,500,000	1 Unit	55,500,000	1 Unit	61,188,750	3 Unit	172,188,750	
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Unit	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	24,200,000	3 Unit	64,200,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	299,500,000	3 lap	299,500,000	3 lap	307,535,000	9 Lap	906,535,000	UPTD PSAAH
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	6,000,000	1 Lap	6,000,000	1 Lap	7,260,000	3 Lap	19,260,000	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	200,000,000	1 Lap	200,000,000	1 Lap	200,000,000	3 Lap	600,000,000	
		1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	93,500,000	1 Lap	93,500,000	1 Lap	100,275,000	3 Lap	287,275,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	32 Unit	370,000,000	32 Unit	370,000,000	32 Unit	412,000,000	96 Unit	1,152,000,000	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	110,000,000	8 Unit	110,000,000	8 Unit	110,000,000	24 Unit	330,000,000	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	60 Unit	180,000,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	4 Unit	242,000,000	12 Unit	642,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	-	82 %	2,715,062,654	84 %	2,838,495,466	86 %	2,971,810,463	86 %	8,225,368,583	UPTD PSBR
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	3 Lap	3,816,469,440	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	3 Lap	3,816,469,440	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	91,699,560	1 Keg	99,035,525	1 Keg	106,958,367	3 Keg	297,693,452	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	91,699,560	1 Paket	99,035,525	1 Paket	106,958,367	1 Paket	297,693,452	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	756,607,478	4 Keg	817,136,394	4 Keg	882,506,984	12 Keg	2,456,250,856	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64,225,332	1 Paket	69,363,359	1 Paket	74,912,428	3 Paket	208,501,119	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	282,182,900	1 Paket	304,757,532	1 Paket	329,138,135	3 Paket	916,078,567	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26,013,006	1 Paket	28,094,364	1 Paket	30,341,591	3 Paket	84,448,961	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	384,186,240	1 Lap	414,921,139	1 Lap	448,114,830	3 Lap	1,247,222,209	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 lap	2 lap	166,560,136	2 lap	179,884,947	2 lap	194,283,942	6 Lap	540,729,025	UPTD PSBR
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	10819008	1 Lap	11684529	1 Lap	12619291	3 Lap	35,122,828	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	155741128	1 Lap	168200418	1 Lap	181664651	3 Lap	505,606,197	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	39 Unit	59 Unit	528,039,000	59 Unit	570,282,120	59 Unit	615,904,690	177 Unit	1,714,225,810	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	89,002,800	6 Unit	96,123,024	6 Unit	103,812,866	18 Unit	288,938,690	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50 Unit	73,481,040	50 Unit	79,359,523	50 Unit	85,708,285	150 Unit	238,548,848	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	365,555,160	3 Unit	394,799,573	3 Unit	426,383,539	9 Unit	1,186,738,272	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW -HM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PM KS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	-	82 %	1,179,931,000	84 %	1,136,996,000	86 %	1,244,292,000	86 %	3,261,219,000	UPTD PSKW -HM
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW -HM)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	747,752,000	1 Lap	822,527,000	1 Lap	904,779,000	3 Lap	2,475,058,000	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	747,752,000	1 Lap	822,527,000	1 Lap	904,779,000	3 Lap	2,475,058,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW -HM)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	228,520,000	4 Keg	251,371,000	4 Keg	276,506,000	12 Keg	756,397,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,154,000	1 Paket	5,669,000	1 Paket	6,235,000	3 Lap	17,058,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49,126,000	1 Paket	54,038,000	1 Paket	59,441,000	3 Lap	162,605,000	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	174,240,000	1 Lap	191,664,000	1 Lap	210,830,000	3 Lap	576,734,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	64,478,000	3 lap	64,478,000	3 lap	64,478,000	9 Lap	193,434,000	UPTD PSKW-HM
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	64,478,000	1 Lap	64,478,000	1 Lap	64,478,000	3 Lap	193,434,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	26 Unit	31 Unit	239,181,000	31 Unit	263,098,000	31 Unit	263,007,000	93 Unit	765,286,000	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	31,735,000	5 Unit	34,908,000	5 Unit	38,398,000	15 Unit	105,041,000	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit	42,446,000	25 Unit	46,690,000	25 Unit	51,359,000	75 Unit	140,495,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	165,000,000	1 Unit	181,500,000	1 Unit	173,250,000	3 Unit	519,750,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resnra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PANTI DISABILITAS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	-	82%	10,000,000	84%	1,208,800,000	86%	1,207,480,000	86%	2,426,280,000	UPTD DISABILITAS
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	2,000,000	100 %	3,200,000	100 %	4,520,000	100 %	9,720,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	101,000,000	1 Dok	101,000,000	3 Dok	203,000,000	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	-	1 Keg	1,000,000	1 Keg	101,000,000	1 Keg	101,000,000	3 Keg	203,000,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	-	4 Keg	4,000,000	4 Keg	404,000,000	4 Keg	404,000,000	12 Keg	812,000,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	1,000,000	3 Paket	101,000,000	3 Paket	101,000,000	9 Paket	203,000,000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	4 Lap	203,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resnra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PANTI DISABILITAS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	-	82%	10,000,000	84%	1,208,800,000	86%	1,207,480,000	86%	2,426,280,000	UPTD DISABILITAS
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	2,000,000	100 %	3,200,000	100 %	4,520,000	100 %	9,720,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	101,000,000	1 Dok	101,000,000	3 Dok	203,000,000	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	-	1 Keg	1,000,000	1 Keg	101,000,000	1 Keg	101,000,000	3 Keg	203,000,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	-	4 Keg	4,000,000	4 Keg	404,000,000	4 Keg	404,000,000	12 Keg	812,000,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	1,000,000	3 Paket	101,000,000	3 Paket	101,000,000	9 Paket	203,000,000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	4 Lap	203,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	UPTD DISABILITAS
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan	-	1 Unit	1,000,000	1 Unit	101,000,000	1 Unit	101,000,000	3 Unit	203,000,000	
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	2 Lap	2,000,000	2 Lap	202,000,000	2 Lap	202,000,000	6 Lap	406,000,000	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000	
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	-	3 Unit	3,000,000	312 Unit	303,000,000	317 Unit	303,000,000	629 Unit	609,000,000	
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1,000,000	6 Unit	101,000,000	6 Unit	101,000,000	13 Unit	203,000,000	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit	1,000,000	305 Unit	101,000,000	305 Unit	101,000,000	611 Unit	203,000,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1,000,000	1 Unit	101,000,000	1 Unit	101,000,000	3 Unit	203,000,000	
JUMLAH KESELURUHAN							125,444,673,000		134,786,478,000		147,381,564,000		406,112,715,000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPD Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur, maka indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 7.1

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1,69	12	12	12	12
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,40	86,10	86,60	87,10	87,10

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 7.2

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya didalam Panti	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya didalam Panti	95,47	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya didalam Panti	64,97	100	100	100	100
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya didalam Panti	100	100	100	100	100
5	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Dararut Bencana Provinsi	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 maka akan menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahunan maupun 3 (tiga) tahunan yang berorientasi pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada umumnya dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada khususnya.

Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan pada periode Renstra tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan Program/Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para stakeholder.

Samarinda, Juli 2023

Kepala,



Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.


Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680814 199403 1 012

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009